

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dillah, H, Phillips, dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, 2012, Alfabeta, Bandung.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Joni, Muhamad dan Zulcana Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kuffal, H.M.A, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang
- Manan, Bagir, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.



- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lasbang Grafika, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia.
- Rhode, Deborah L, 2004, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York.
- Sambas, Nandang, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siregar, Bismar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soeryono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soetedjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Winarta, Frans Hendra, 1995, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Kompotindo, Jakarta.



Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

YLBHI dan PSHK, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta.

## **B. Artikel Jurnal**

Mustika Prabaningrum Kusumastuti, Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access To Justice* Bagi Orang Miskin, *Arena Hukum*, Vol. 9 No. 2, Agustus 2016.

Nurini Aprilianda, *Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak di Indonesia dalam Kerangka Perlindungan Anak*, *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10 No 1, Juni 2015.

Wahyudhi, Dheny, "Keseimbangan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Kerangka Restorative Justice", *Journal Unja*, Vol. 25 No. 1, Maret 2014.

## **C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Kushartinah, Bangkit, 2014, "*Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Proses Penanganan Perkara Pidana*", Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **D. Internet**

Dwitha Riris Anggraini Nainggolan, "Pemberian Bantuan Hukum pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/23577> diakses pada tanggal 25 Desember 2018.

Erna Ratnaningsih, "Peran Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum", <http://businesslaw.binus.ac.id/2016/10/16/pera-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2018.

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta, "Bapas Jogja Petakan Keberhasilan Diversi Tahun 2017", <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/3104-bapas-jogja-petakan-keberhasilan-pelaksanaan-diversi-tahun-2017>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2018.



KBBI Daring, “Narasumber”, [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul), diakses pada 10 Mei 2019.

Laras Susanti, “Memaknai 8 Tahun UU Bantuan Hukum”, <https://kumparan.com/larassusanti/memaknai-8-tahun-uu-bantuan-hukum-1551412893228820040>, diakses pada tanggal 12 Mei 2019.

LBH Sembilan Delapan, “Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia”, <https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/12/sejarah-bantuan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2019.

Mamik Sri Supatmi, Purnianti dan Ni Made Martini Tinduk, “Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia”, [https://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1\\_2finalpdf](https://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2finalpdf), diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

Murtadha, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, <http://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=202ge=14>, diakses pada tanggal 29 April 2019.

Paulus Hadisuprpto, “Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)”, <http://eprints.undip.ac.id/28100/>, diakses tanggal 21 November 2018.

Pengadilan Negeri Sarolangun, “Hak Mendapat Bantuan Hukum”, <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/layanan-hukum/hak-hak-pokok-masyarakat-pencari-keadilan/hak-bantuan-hukum>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019.

Sindo News, “Kejahatan Anak di DIY Mencemaskan”, <http://daerah.sindonews.com/read/958501/kejahatan-anak-di-diy-mencemaskan-1422766033>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2018.

Yolanda Putri Dewanti, “Implementasi Bantuan Hukum Oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana”, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20E1A009I40.pdf>, diakses 29 April 2019.

## **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 388 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.



Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa  
Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*),  
Resolusi Nomor 40/33 Tahun 1985.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 Tanggal 5 Desember  
1989 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of  
The Child*).